

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT DALAM PENGEMBANGAN POTENSI WISATA DI KAWASAN DESA PEPAS EHENG

Hermanus sundal¹ Burhanuddin² Sry Resky Mulka³

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan Peran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dalam Pengembangan Potensi Wisata Di Kawasan Desa Pepas Ehen karena kurangnya perhatian oleh pemerintah terhadap wisata yang ada di desa pepas Eheng. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan teknik analisis data model interaktif berupa pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan Peran Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, serta pemerintahan desa pepas Eheng dalam mengembangkan wisata yang ada di desa Pepas Eheng, karena wisata yang ada kurang nya perawatan sehingga mengurangi minat pengunjung wisata dan berdampak terhadap pendapatan masyarakat yang mengandalkan wisata ini, di karenakan wisata yang tidak terawat, pemerintah desa Pepas Eheng menagendakan agar merawat kembali wisata yang ada di desa Pepas Eheng dengan mengkoordinasikan kembali kepada pemerintah daerah agar dapat melanjutkan pengembangan wisata desa Pepas Eheng.

Kata Kunci : Fasilitator, Motivator, Dinamosator.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: hermanhermanus0@gmail.com

² Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

³ Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Pendahuluan

Kutai Barat memiliki potensi wisata yang cukup besar, baik wisata budaya maupun wisata alam. Objek wisata di Kabupaten Kutai Barat tersebar hampir di setiap Kecamatan yang ada, sehingga setiap kecamatan memiliki kesempatan dalam mengembangkan potensi wisata. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata, bahwa kepariwisataan di Kabupaten Kutai Barat mempunyai peranan yang penting untuk memupuk rasa cinta tanah air, meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, kebudayaan daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional, merupakan potensi dasar yang dominan bagi pengembangan pariwisata, yang harus dibina dan ditumbuh kembangkan, serta dapat dipertahankan nilai dan ciri khasnya dalam persentuhannya dengan kegiatan – kegiatan kepariwisataan.

Salah satu objek wisata di Kabupaten Kutai Barat adalah Kampung Pepas Eheng yang terletak di Kecamatan Barong Tongkok Provinsi Kalimantan Timur. Masyarakat kampung Pepas Eheng sekarang berjumlah sekitar 200 jiwa berdasarkan data dari Dinas Capil Kutai Barat yang mayoritas adalah masyarakat Dayak Benuaq. di kampung Pepas Eheng juga terdapat Lamin Adat yang dijadikan sebagai objek wisata, adapula wisata yang dapat di lihat di lamin ini adalah sebagai berikut adalah 1. Lamin Adat dengan bangunan berarsitektur kuno. 2. Di depan lamin terdapat kuburan kuno khas kuburan dayak (tempelaq). 3. Patung-patung besar biasa di sebut dengan (belontank). 4. Kepala kerbau bertanduk panjang. 5. Tiang-tiang lamin yang besar terbuat dari kayu ulin kuno. 6. Benda-benda kuno untuk di gunakan pada saat upacara adat. 7. Dinding lamin terbuat dari kulit kayu dan atap lamin terbuat dari kayu ulin.

Masyarakat selama ini bergantung pada wisata lamin adat, kerajinan tangan, dan pertanian. Karena selama ini selain bergantung pada ladang masyarakat juga bergantung pada wisata lamin adat, Sebelum lamin adat disahkan sebagai cagar budaya banyak turis lokal ataupun turis asing yang berdatangan mengunjungi wisata lamin adat ini karna terkenal dengan keaslian serta lamin ini adalah lamin tertua yang terdapat di Kutai Barat, setelah disahkan oleh pemerintah daerah sebagai cagar alam yang harus dilestarikan, maka dilakukan perbaikan fasilitas lamin yang rusak dan pembersihan lamin. Namun hanya bersifat sementara, sehingga sekarang terjadi banyak fasilitas lamin yang rusak, papan yang rapuh, tiang-tiang dan patung-patung yang berlumut, adanya tanduk kepala kerbau yang menandakan bahwa lamin tersebut sering dipakai untuk acara adat, ada pula kuburan khas dayak benuaq

yang tidak dijaga dengan baik seakan ada nilai budayanya, serta plang penanda wisata dan peraturan cagar budaya rusak yang rusak karena kurangnya perhatian oleh pemerintah daerah, sehingga menurunnya pengunjung wisata untuk berwisata ke kampung Pepas Eheng lagi dan berakibat menurunnya hasil ekonomi dari penghasilan yang terdapat di wisata ini, karna kurangnya perawatan dan perhatian terhadap wisata oleh pemerintah kampung maka dari itu dibutuhkan perhatian dari pemerintah kampung dalam mengembangkan wisata yang ada di Kampung Pepas Eheng

Kerangka Dasar Teori Otonomi Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pengertian Desa adalah sebagai berikut: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat”.

Peran Pemerintah Desa

Peran pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor desa, dan sebagainya. Pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah mufakat untuk pembangunan, yang akhirnya dalam pelaksanaannya masyarakat secara semangat gotong-royong kerja bakti dalam pembangunan tersebut yang telah menjadi suatu kesepakatan bersama. Hak ini berarti masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan didesa secara keseluruhan dari tahap awal sampai tahap akhir pembangunan.

Pariwisata

Menurut James J. Spillane (1982) Pariwisata merupakan aktivitas melakukan perjalanan dengan tujuan memperoleh kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menunaikan tugas. Pariwisata bisa diartikan juga sebagai sebuah perjalanan dari sebuah tempat ke tempat lain untuk rekreasi atau bersenang-senang kemudia kembali ke tempat awal. Koen Meyers

(2009:22) Pariwisata merupakan kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sementara waktu dari tempat tinggal awal ke daerah tujuan dengan alasan bukan untuk menetap atau mencari nafkah melainkan hanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, menghabiskan waktu senggang maupun libur dan dan bisa saja menghabiskan uang yang terlalu banyak.

Pengembangan Desa Wisata

Purwadarminta (1976), Pengembangan desa wisata adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, dan berguna. Maka pengembangan dalam hal ini dapat diartikan membuat menjadi ada dari yang belum ada sehingga dari yang sudah ada menjadi lebih baik dan dari sudah baik menjadi lebih baik, demikian seterusnya.

Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif karena berupa analisis data nonstatistik dan mempertimbangkan asumsi atau pendapat orang lain yang disebut sebagai narasumber. Strategi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, karena penelitian ini bersifat mendeskripsikan fenomena secara fakta, urut dan sistematis. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Jenis penelitian ini diharapkan mampu untuk mendeskripsikan dan menjawab persoalan mengenai peran pemerintah Daerah dalam pengembangan potensi wisata di desa Pepas Eheng.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang menjadi obyek penelitian penulis adalah Pemerintah Desa Pepas Eheng Dan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Adapun waktu yang penulis tentukan dalam pelaksanaan proses penelitian ini adalah pada bulan Oktober 2020 dan selesai pada bulan Januari 2021.

Sumber Data

Menurut Arikunto (2002:107) bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Adapun menurut Indriantoro (2002:146), sumber data dapat dibagi menjadi 2 bagian.

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) langsung melalui Informan dan *Key Informan* melalui kegiatan wawancara yang dilakukan yaitu melakukan tanya jawab secara langsung berdasarkan pedoman pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian.

Pengambilan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. *Purposive Sampling* yaitu salah satu teknik *sampling non random* sampling dimana peneliti menentukan pengambilan *Key Informan* dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Menurut Sugiyono (2010:334) *Purposive Sampling* adalah teknik untuk menentukan *Key Informan* dalam penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih akurat dan tepat sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti. *Snowball sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2001:61). Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama semakin besar.

Dalam pengambilan dan pengumpulan data dengan menggunakan *Purposive Sampling*, *Key Informan* merupakan sebagai sumber data yang utama dan akurat dalam memberikan data berkaitan dengan peran pemerintah, *Key Informan* dalam penelitian ini yaitu Kepala Kampung di Kampung Pepas Eheng dan para pengurus Lamin Adat. Dengan menggunakan *Purposive Sampling* untuk memperoleh data, agar dari tiap-tiap *Key Informan* sesuai dengan kriteria dan bidangnya dapat memberikan data yang akurat dan tepat sesuai dengan fokus penelitian yang penulis lakukan.

Data primer merupakan data penelitian yang diperoleh secara langsung dari Informan dan *Key Informan* yang berkaitan dengan penelitian. Data ini merupakan bahan hasil wawancara terhadap informan, dan dikumpulkan sendiri oleh pelaksana penelitian untuk dipergunakan sebagai data dan bahan masukan bagi penelitian yang dilakukan.

2. Data sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tapi melalui media perantara (diperoleh dan dicatat sebelumnya oleh pihak lain). Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelum riset dilaksanakan. Data sekunder antara lain merupakan data yang sudah ada atau tersedia di organisasi yang akan diteliti berupa struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi pegawai, program kebijakan organisasi, atau data lainnya yang digunakan sebagai bahan bacaan serta informasi lainnya dari berbagai sumber.

Teknik Pengumpulan Data

pengumpulan data-data dari literatur, buku-buku, dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan masalah. Membaca, dan mempelajari buku-buku untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

1. Penelitian lapangan

Yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lapangandan mengumpulkan data-data secara langsung ke lapangan dengan menggunakan

teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumen. Sehingga penulis memperoleh data yang akurat dalam melakukan penelitian.

2. Pengamatan/Observasi

Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2013:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

3. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2013:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide-ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

4. Dokumen

Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif yang mendeskriptifkan dan menjabarkan data dan fakta tanpa memberikan penilaian, dimana aktivitas dalam menganalisis data deskriptif kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

Hasil Dan Pembahasan

A. Fasilitator

Sebagai fasilitator pengembangan potensi pariwisata, peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program yang akan dilaksanakan. Adapun pada praktiknya pemerintah biasa mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak, baik itu swasta maupun masyarakat. Pemerintah sebagai Fasilitator Peran pemerintah desa adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berbagai pihak dalam mengoptimalkan pembangunan wisata desa). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman, termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan.

B. Motivator

Dalam pengembangan pariwisata, pemerintah desa sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha pariwisata terus berjalan. Masyarakat, serta pengusaha dibidang pariwisata merupakan sasaran utama yang perlu untuk terus diberikan motivasi agar perkembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengembalikan kepercayaan diri dari pengurus pengurus pariwisata ini.

C. Dinamisator

Dinamisator adalah menggerakkan partisipasi multipihak tatkala stagnasi terjadi dalam proses pembangunan (mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah). Sebagai dinamisator, pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada

masyarakat. pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat berpengaruh terutama dalam upaya untuk menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat di kampung Pepas Eheng, yang dilakukan melalui pengembangan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat kampung Pepas Eheng untuk berpartisipasi dalam pembangunan, perkembangan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Serta pemerintah desa memiliki peran penting terhadap masyarakat kampung yaitu sebagai fasilitator yang menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program pengembangan yang akan dilaksanakan, motivator yaitu sebagai pendorong atau penarik masyarakat agar mampu melaksanakan kegiatan yang dihadapi, dinamisator pemerintah desa berperan melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat agar terciptanya pemerintahan desa yang dinamis.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan disini penulis mengambil sebuah kesimpulan berdasarkan apa yang telah penulis teliti dengan cara teknik wawancara dan pengumpulan data serta observasi secara langsung di tempat penelitian kemudian dari pada itu disini penulis akan menjelaskan kesimpulan dari apa yang penulis teliti.

1. Peranan pemerintah desa dalam pengembangan desa wisata di Kabupaten Kutai Barat.

a. Fasilitator

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan perbaikan, pembersihan dan juga memfasilitasi kegiatan terhadap pengelolaan tempat wisata ini, namun itu hanyalah bersifat sementara dan tidak berjalan dengan semestinya karena kesibukan masyarakat kampung Pepas Eheng yang tidak hanya mengurus pengelolaan wisata namun juga ada kegiatan yang tidak dapat di tinggalkan oleh masyarakat, maka dari itu lah pengelolaan wisata tidak berjalan maksimal sehingga menurunnya minat para wisatawan ketempat wisata di karenakan kurangnya pengelolaan serta perawatan terhadap tempat wisata ini, dan dari itu pemerintah desa berinisiatif untuk membentuk kepengurusan dan pengelolaan tempat wisata yang terbentuk struktur pengurus wisata kampung Pepas Eheng yang beranggotakan beberapa masyarakat kampung untuk mengkoordinir setiap ada pengelolaan yang bersifat pembersihan serta perawatan tempat wisata di kampung Pepas Eheng.

b. Motivator

Penulis dapat menyimpulkan bahwa pemerintah desa telah berupaya melakukan koordinasi kepada pemerintah daerah kabupaten Kutai Barat untuk bersama-sama membantu dalam pengelolaan sehingga dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan untuk memotivasi masyarakat agar lebih giat lagi dalam melakukan pengelolaan wisata namun untuk sementara waktu harus menunggu beberapa bantuan berupa barang-barang dari pemerintah daerah untuk membantu dalam beberapa pengelolaan yang bersifat pembersihan tempat wisata yang ada, akan tetapi harus menunggu karena masih dilanda pandemi jadi pemerintah daerah belum dapat mengirimkan barang-barang tersebut karena

keterlambatan oleh adanya pandemi, untuk itu sebenarnya barang-barang tersebut sebagai motivasi kepada para pengurus wisata serta masyarakat yang ikut mengelola wisata tersebut.

c. Dinamisator

Penulis dapat mengambil kesimpulan pemerintah desa telah melakukan dorongan atau kontribusi untuk mengajak masyarakat bersama mengelola seperti melibatkan para pemuda dan para tokoh masyarakat yang mengetahui tentang sejarah serta latar belakang wisata tersebut ada, namun itu bersifat sementara setelah beberapa waktu sebelum adanya terbentuk struktur kepengurusan yang dibuat oleh pemerintah desa, setelah dibentuknya kepengurusan tersebut maka pemerintah desa kembali mengajak masyarakat termasuk tokoh-tokoh masyarakat serta pemuda-pemudi bersama-sama lagi dalam mengelola wisata yang ada di kampung Pepas Eheng, dan tidak hanya mengelola tapi masyarakat juga memiliki tanggung jawab menjaga situs-situs wisata yang ada agar terhindar dari kerusakan dan pencurian barang-barang yang berada di tempat wisata, selain hal-hal tersebut masyarakat juga diperbolehkan berjualan seperti sovenir- sovenir barang-barang khas masyarakat kampung Pepas Eheng guna meningkatkan perekonomian yang ada di kampung serta tempat wisata lebih dikenal banyak masyarakat luas.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat, khususnya dinas pariwisata untuk mengoptimalkan penyediaan fasilitas dalam pengembangan desa wisata di kampung Pepas Eheng guna menarik kembali minat wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara sehingga kampung Pepas Eheng yang terdapat tempat wisatanya tidak hanya ramai pengunjung pada saat hari libur tetapi ramai juga pada hari-hari biasa, sebagaimana mestinya Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Kampung Pepas Eheng perlu adanya komunikasi atau relasi hubungan antara pemerintah kampung dan pemerintah daerah yang baik guna sama-sama memajukan wisata yang berada di Kampung Pepas Eheng, sehingga dapat mengembalikan wisata seperti ramai dengan pengunjung pada waktu seperti dulu kembali sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kampung Pepas Eheng dipariwisata yang ada, tidak hanya itu pemerintah daerah juga dapat membantu dalam segala hal yang diperlukan oleh pemerintah kampung Pepas Eheng ajukan agar dapat meningkatkan hubungan baik antara pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung Pepas Eheng serta masyarakatnya.

2. Pemerintah Kampung Pepas Eheng

Selain fasilitas fisik modal utama dalam pengembangan dan pengelolaan kegiatan yang dilakukan pemerintah Kampung Pepas Eheng yang juga memiliki visi pelestarian pengembangan serta pengelolaan tempat wisata, pemerintah perlu lebih cepat dalam merespon keadaan tempat wisata yang ada agar tidak terjadinya kerusakan serta kerapuhan tempat wisata yang ada, dan juga pemerintah

Kampung Pepas Eheng perlu juga memperkuat lagi komunikasi antara pemerintah kampung dan pemerintah Kabupaten agar tidak terjadinya keterlambatan pemerintah Kabupaten dalam menyalurkan bantuan berupa alat-alat guna membantu dalam pengelolaan dan pengembangan tempat wisata yang ada ini, sehingga terjadinya pemerataan dalam pengelolaan dan pengembangan tempat-tempat wisata yang ada di Kampung Pepas Eheng, serta memperkuat lagi hubungan dengan masyarakat karena pemerintah kampung tidak dapat berkerja sendiri dalam mengelola dan mengembangkan wisata jika tidak melibatkan masyarakat kampung karena beberapa masyarakat juga mengambil bagian dalam pengelolaan wisata di kampung, dan juga pemerintah Kampung harus melibatkan kepengurusan yang telah dibuat oleh pemerintah Kampung Pepas Eheng sehingga pengelolaan berjalan dengan baik.

3. Panitia Kepengurusan Wisata dan Masyarakat kampung Pepas Eheng

Dalam kepengurusan tempat wisata ini panitia yang ada harus lebih aktif lagi dalam melakukan koordinasi dengan pemerintah kampung sehingga dapat menjalin hubungan baik dengan pemerintah kampung guna pengembangan dan pengelolaan wisata karna pemerintah telah membentuk struktur pengurusan yang ada sekarang untuk mengoptimalkan pengelolaan agar lebih memantapkan dalam mengelola wisata sehingga dapat meningkatkan daya tarik wisata kepada para pengunjung lokal maupun pengunjung mancanegara yang berkunjung atau sedang melakukan liburan, karena pengelolaan yang baik dilakukan oleh kepengurusan wisata dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kampung Pepas Eheng. Tidak lupa juga para panitia pengurusan ini dapat juga mengajak masyarakat dalam mengelola dan menjaga situs-situs wisata yang ada sehingga terawat dan terjaga keaslian dan kebersihan tempat wisata untuk kenyamanan para pengunjung wisata. Dan bagi masyarakat yang berada di Kampung Pepas Eheng agar lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan yang bersifat pengembangan atau pengelolaan tempat wisata yang dilaksanakan pemerintah kampung serta dapat mengikuti keanggotaan kepengurusan tempat wisata yang telah dibuat oleh pemerintah kampung guna melestarikan dan menjaga wisata yang ada, serta dapat membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat sudah dibuat di dalam struktur kepengurusan wisata sehingga masyarakat dapat mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh pengurusan wisata yang bersifat bersama-sama atau bergotong royong dalam pengelolaan dan pengembangan wisata yang ada ini agar dapat terjaga dan menarik untuk para pengunjung serta menambah hasil penjualan seperti kerajinan tangan masyarakat yang berjualan di tempat wisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat kembali.

Daftar Pustaka

James , Spillane, J. (1982:20. Pariwisata Indonesia, Sejarah dan Prospeknya).
Meyers, Koen. (2009. Pengertian Pariwisata, Jakarta: Unesco Office).

- H. Kodhyat. (1998. Sejarah Pariwisata dan Perkembangannya di Indonesia. Jakarta. Grasindo).
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin. (2003. Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka).
- Ermaya Suradinata, (Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007).
- Affan Gaffar, (Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2004).
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Sinar Bakti Fakultas Hukum UI).
- Suradinata, Ermaya., (2005 *manajemen sumber daya manusia*, Jakarta PT. Gahlia)
- Ndraha, Taliziduhu. (1997. Budaya Organisasi. Jakarta: Rineka Cipta).
- Sugiyono. (2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV AlfabetaCT Simorangkir dkk, 2008, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta).
- Sutrisno Hadi. (2000 Analisis Pergresi Yogyakarta Andi Offset)
- Esterberg, Kristin G., (2002. Qualitative Methods in Social Research, Mc. Graw Hill, New York).
- Sugiyono. (2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.CV)
- Ardianto, Alif., (Pemberdayaan Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Fasilitator Dan Katalisator Dalam Usaha Pemulihan Sektor Usaha Kecil DanMenengah Di Wilayah Erupsi Merapi 2010, Artikel Ilmiah. Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).
- Yoeti, Oka A, (2001:188. Pemasaran Pariwisata, Angkasa, Bandung)
- Soekanto, Soerjono. (Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Soekanto, Soerjono. (1987:221 . Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Rajawali).
- Poerwadarminta W.J.S.(1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka).
- Siagian, S.P. (1992. Organisasi Kepemimpinan & Perilaku Administrasi. Jakarta: Rineka Cipta).

Dokumen-dokumen

- Peraturan Daerah Kabupateng Kutai Barat (Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataaan)
- Undang-Undang (Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa)